



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA



RENCANA AKSI TAHUN 2025

Nomor : 000.7.2/0123/300.05

RENCANA AKSI TAHUN 2025



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA**



RENCANA AKSI TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan dokumen Rencana Aksi ini sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

Pada dokumen Rencana Aksi ini diharapkan dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Kami menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dan beberapa kekurangan dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi ini, sehingga saran dan masukan sangat kami harapkan. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan staf yang terkait dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi ini.

Samarinda, 27 Mei 2025

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Samarinda



SUCIPTO, S.Pd, M.Si.
NIP. 19670319 199702 1 003



RENCANA AKSI TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Sistematika Penulisan	4
 BAB II RENCANA AKSI	
A. Rencana Strategis	5
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	6
C. Perjanjian Kinerja	6
d. Rencana Aksi	10
 BAB III PENUTUP	15



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi).

Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja untuk memantau hasil capaian kinerja secara berkala, faktor penghambat serta faktor pendukung sehingga dapat ditemukan upaya-upaya perbaikan sehingga capaian kinerja dapat dicapai lebih optimal.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan laporan rencana aksi adalah tersusunnya laporan realisasi rencana aksi atas pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Tujuan disusunnya laporan rencana aksi yaitu :

- a. Untuk merencanakan pencapaian target kinerja secara berkala;
- b. Untuk pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk memudahkan dalam monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja;
- d. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.



1.3 SISTEMATIS PENULISAN

Sistematika penulisan laporan rencana aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025 seperti berikut :

Bab I Pendahuluan

Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan.

Bab II Rencana Aksi

Menyajikan mengenai Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda periode 2021-2026, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi

Bab III Penutup

Menyajikan penjelasan singkat mengenai peran penting penyusunan rencana aksi.



BAB II

RENCANA AKSI

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra telah mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026, khusus terkait dengan prioritas pembangunan pada bidang Tatakelola Pemerintahan dengan menerapkan prinsip good governance dan clean government.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda memberikan kontribusi terhadap perwujudan visi, misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Adapun visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah ***“Terwujudnya kota Samarinda sebagai kota Pusat Peradaban”*** Untuk mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota, maka sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melalui program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (sub kegiatan) Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dapat menyatukan berbagai perbedaan keyakinan agama dan sedangkan Misi yang diemban terdapat pada Misi 3 (tiga) yaitu : ***Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi Masyarakat.***

Adapun tujuan Strategis yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah :

1. Terwujudnya Pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan
2. Terciptanya Pelayanan Prima bagi masyarakat

Sedangkan Sasaran Strategis dapat ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial
2. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan SKPD



RENCANA AKSI TAHUN 2025 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda yang akan digunakan untuk periode tahun 2021-2026 sesuai periode Renstra telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor : 100/45-Sk/300.06 Tentang Indikator Kinerja Utama (Iku) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarindatahun 2021 – 2026. Adapun Indikator kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda seperti berikut :

Table 2.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
Tahun 2021-2026

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi	Target Kinerja
1	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Presentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan Konflik sosial	Jumlah Peserta Sosialisasi yang paham kegiatan Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial dibagi yang belum memahami di kalikan 100%	100%

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja
1	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Presentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan Konflik sosial	100%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Utama	Target/ Satuan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Presentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan Konflik sosial	33,33%	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 2. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 3. Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka 4. Pembentukan Paskibraka 5. Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.	2.421.161.000 278.500.000 95.286.000 148.125.000 1.803.000.000 96.250.000
2		Presentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan Konflik sosial	100%	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kegiatan ; Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	5.277.910.000
					Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.850.000.000



RENCANA AKSI TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Utama	Target/ Satuan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
					2. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	944.679.000
					3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	483.231.000
3		Presentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan Konflik sosial	17,07%	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	263.728.000
					Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	125.440.000
					2. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	138.288.000
4		Presentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan Konflik sosial	45%	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.284.255.000
					Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	139.002.000
					2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.145.253.000



RENCANA AKSI TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Utama	Target/ Satuan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
5		Presentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan Konflik sosial	20%	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.157.175.000
					Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	239.812.000
					2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100.000.000
					3. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota.	1.817.363.000
Total Pagu Anggaran						11.404.229.000

2.4 RENCANA AKSI

Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025 yang dituangkan secara berkala (per bulan atau triwulan). Adapun Rencana Aksi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

RENCANA AKSI TAHUN 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	RENCANA PELAKSANAAN				Program, /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output)	Rencana Aksi/Aktivitas	Target Kegiatan	TARGET KINERJA KEGIATAN				Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV		
Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Presentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan Konflik sosial	100%	10%	30%	35%	25%	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat		29,17%	1,56%	1,64%	12,98%	12,99%		Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
							Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		1200 orang	200 Orang	350 Orang	350 Orang	300 Orang	2.421.161.000	
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1. Rapat/ Koordinnasi dengan Instansi Terkait 2. Pengukuhan FPK 3. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 4. Upacara Bela Negara Sosialisasi Ideologi Wawasan Kebangsaan	800 orang	1 Kali Kegiatan Rapat,	1 Kali Kegiatan Pengukuhan	1 kali kegiatan Sosialisasi dengan Peserta Pelajar SMP dan SMA seKota Samarinda	1 kali Kegiatan Upacara Bela Negara dan Sosialisasi dengan Peserta Pelajar SMP dan SMA seKota Samarinda	278.500.000	
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1. - Sosialisasi Pembauran Kebangsaan - Rapat/ Koordinnasi dengan Instansi Terkait	8 laporan	-	-	3 kali kegiatan Sosialisasi dengan peserta FPK Kecamatan	-	95.286.000	
							Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1. - Upacara hari Lahir Pancasila - Rapat/ Koordinnasi dengan Instansi Terkait	4 dokumen	-	1 kali kegiatan dengan peserta 400 orang	-	-	148.125.000	
							Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	1. Sosialisasi Pendaftaran Calon Paskibraka 2. Pelaksanaan Seleksi Pembentukan Calon Paskibraka 3. Pusdiklat Paskibraka - Rapat/ Koordinnasi dengan Instansi Terkait 4. Anjangsana	300 orang	1 kali kegiatan dengan peserta Guru Pembina, SMA/K/MA Lokasi Aula Disperpus	1 kali kegiatan dengan jumlah peserta 300 orang dari Guru Pembina, SMA/K/MA Lokasi Balaikota, Koramil Utara, GOR Sempaja	1 kali kegiatan Pusdiklat dengan jumlah peserta 42 orang	1 Kali Kegiatan Anjangsana	1.803.000.000	
							Sub Kegiatan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila.	1. - Diklat PIP - Pengukuhan Anggota DPPI 2. Rapat/ Koordinnasi dengan Instansi Terkait 3. Pengukuhan Pelaksana DPPI	40 orang	1 Kali Kegiatan Diklat PIP dan 1 kali kegiatan Pengukuhan Anggota DPPI	1 Kali Rapat	1 Kali Kegiatan Pengukuhan Pelaksana DPPI	-	96.250.000	
Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Presentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan Konflik sosial	100%	10%	35%	35%	20%	PROGRAM : PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik		100%	10%	20%	35%	35%		Bidang Pendidikan Politik Dalam Negeri
							Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan C11, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan		1200 orang	200 Orang	350 Orang	350 Orang	300 Orang	5.277.910.000	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	RENCANA PELAKSANAAN				Program./Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output)	Rencana Aksi/Aktivitas	Target Kegiatan	TARGET KINERJA KEGIATAN				Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV		
							Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1. Hibah Polresta Samarinda 2. Hibah Parpol 3. Bimtek Pelaporan Keuangan Partai Penerima Hibah Tahun 2025	10 Dokumen	1 dokumen	10 dokumen	-	1 kali Kegiatan Bimtek dengan	3.850.000.000	
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1. Koordinasi dengan Instansi dan Lembaga Terkait 2. Kegiatan Inovasi Pemilos 3. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik	2500 orang	Koordinasi dengan Instansi dan Lembaga Terkait	5 kali kegiatan dengan peserta sesuai jumlah siswa sekolah tujuan	7 kali kegiatan dengan jumlah peserta 1000 orang	2 kali kegiatan dengan jumlah peserta 250 orang	944.679.000	
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1. Monitoring TIM TP3D	12 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	483.231.000	
Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Presentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan Konflik sosial	100%	10%	30%	35%	25%	PROGRAM : PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah ormas yang di berdayakan		15,85%	1,37%	2,25%	6,11%	6,12%		Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
							Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang dibina		45 Ormas	10 Ormas	10 Ormas	15 Ormas	10 Ormas	263.728.000	
							Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1. Sosialisasi Pembinaan ORMAS	600 orang	-	1 kali kegiatan dengan jumlah peserta 100 orang	-	-	125.440.000	
							Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1. Monitoring 2. Bimtek Tata Kelola ORMAS	50 laporan	-	1 kali kegiatan dengan jumlah peserta 120 orang	1 kali kegiatan dengan jumlah peserta 120 orang	-	138.288.000	
Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan	Presentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, sosial budaya, Pertahanan dan	100%	10%	30%	35%	25%	PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan		40%	3,57%	9,24%	13,52%	13,67%		Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	RENCANA PELAKSANAAN				Program./Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output)	Rencana Aksi/Aktivitas	Target Kegiatan	TARGET KINERJA KEGIATAN				Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV		
Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Keamanan Konflik sosial						Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		45 laporan	10 Laporan	10 Laporan	15 Laporan	10 Laporan	1.284.255.000	
							Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1. Sosialisasi Pembinaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600 orang	-	-	1 kali kegiatan dengan jumlah peserta 130 orang	-	139.002.000	
							Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1. Monitoring	30 laporan	-	2 kali kegiatan dengan jumlah peserta 300 orang	3 kali kegiatan dengan jumlah peserta 450 orang	-	1.145.253.000	
Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Presentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan Konflik sosial	100%	10%	30%	35%	25%	PROGRAM : PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti		20%	1,77%	5,04%	6,56%	6,63%		Bidang Kewasnas dan Penanganan Konflik Sosial
							Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani		24 kasus	4 kasus	7 kasus	8 kasus	5 kasus	2.157.175.000	
							Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1. Rapat Koordinasi 2. Sosialisasi tentang Tenaga Kerja Asing	1500 orang	4 kali kegiatan dengan jumlah peserta @ 30 orang atau 120 orang	4 kali kegiatan dengan jumlah peserta @ 30 orang atau 120 orang	2 kali kegiatan dengan jumlah peserta @ 30 orang atau 60 orang dan 2 kali kegiatan Sosialisasi dengan jumlah peserta @ 100 orang atau 200 orang	-	239.812.000	
							Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1. Rapat Monitoring	14 laporan	3 kali kegiatan dengan jumlah peserta @ 30 orang atau 90 orang	3 kali kegiatan dengan jumlah peserta @ 30 orang atau 90 orang	-	-	100.000.000	
							Sub Kegiatan : Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1. Rapat Tim Cipta Kondisi dan Sosialisasi tentang paham Radikalisme 2. Rapat Forkopimda	12 dokumen	4 kali kegiatan dengan jumlah peserta @ 45 orang atau 180 orang dan 3 kali kegiatan sosialisasi @ 150 orang atau 450 orang	3 kali kegiatan dengan jumlah peserta @ 75 orang atau 225 orang	3 kali kegiatan sosialisasi dengan jumlah peserta @ 150 orang atau 450 orang	-	1.817.363.000	



RENCANA AKSI TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

PENUTUP

Tercapainya rencana program pada dokumen Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025 didukung oleh kontribusi penuh dari bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi masing bidang.

Penyusunan dokumen Rencana Aksi ini sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

Rencana aksi ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pelaksanaan dan pengembangan sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan, dengan memperhatikan pemantauan dan evaluasi. Penyusunan rencana aksi ini dapat mendorong penyelenggaraan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran program yang sebaik-baiknya. Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua bidang diharapkan agar tujuan program dan kegiatan secara menyeluruh dapat tercapai.

Samarinda, 27 Mei 2025

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Samarinda



SUCIPTO, S.Pd, M.Si.
NIP. 19670319 199702 1 003